

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan penelitian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyumas mendandakan bahwa program tersebut sudah dijalankan secara cukup luas dengan dukungan sistem kelembagaan yang relatif tertata, terutama melalui peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana operasional. Program ini telah mencakup berbagai jenjang pendidikan dan memberikan dampak langsung bagi peserta didik, khususnya dalam meningkatkan kesiapan mereka untuk belajar serta membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Meskipun demikian, dari segi jangkauan, program ini masih tergolong terbatas karena baru mencakup sebagian kecil dari keseluruhan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Banyumas.

Pada tahap pelaksanaan di tingkat sekolah, implementasi program memperlihatkan bahwa seluruh proses telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran makanan berlangsung secara berkala, dengan keterlibatan aktif para guru dalam melakukan pengawasan. Akan tetapi, kesesuaian prosedural tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh efektivitas substantif. Berbagai kendala seperti keterlambatan distribusi, keterbatasan fasilitas penyimpanan, serta ketidaksesuaian menu dengan preferensi siswa masih terjadi secara berulang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas pelaksanaan di tingkat lokal.

Dari perspektif ekonomi politik institusional, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa permasalahan dalam implementasi Program MBG tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis, melainkan berkaitan erat dengan struktur kelembagaan yang membentuknya. Dominasi institusi formal yang bersifat terpusat, keterbatasan struktur insentif, serta minimnya ruang partisipasi aktor lokal menjadi faktor utama yang memengaruhi pola implementasi program. Dalam kerangka pemikiran North (1990), kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian

antara institusi formal dengan institusi informal, di mana aktor lokal mengembangkan praktik adaptif untuk mengatasi keterbatasan kebijakan yang ada.

Selain itu, pola pemaknaan aktor lokal terhadap program juga menunjukkan kecenderungan penerimaan yang bersifat pragmatis dan pasif. Guru menerima program sebagai bagian dari tanggung jawab pelaksanaan, orang tua memaknainya sebagai bantuan pemerintah, sementara siswa melihatnya sebagai pengalaman yang menyenangkan. Pola penerimaan ini lebih didasarkan pada manfaat langsung yang dirasakan, bukan pada kesadaran sebagai pemegang hak atau keterlibatan dalam proses kebijakan. Dalam konteks ini, desain kebijakan yang bersifat top-down secara tidak langsung membentuk relasi yang asimetris antara negara dan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyumas berada dalam kondisi yang secara administratif berjalan, namun secara substantif masih menghadapi berbagai ketegangan struktural. Permasalahan yang muncul tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi dari desain kelembagaan yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas kondisi di tingkat lokal. Dengan demikian, perbaikan implementasi Program MBG memerlukan transformasi kelembagaan yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang lebih adil bagi aktor lokal dalam proses kebijakan.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyumas.

Pertama, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan pada tingkat lokal, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas penyimpanan makanan serta sistem distribusi yang lebih efisien. Hal ini penting untuk meminimalkan kendala teknis yang selama ini terjadi dan meningkatkan kualitas layanan yang diterima siswa.

Kedua, pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap struktur insentif dalam pelaksanaan program, terutama terkait alokasi anggaran per porsi makanan. Penyesuaian ini diperlukan agar penyedia layanan memiliki ruang yang cukup untuk menjaga kualitas gizi tanpa harus mengorbankan variasi dan kelayakan menu.

Ketiga, Perlu disediakan kesempatan partisipasi yang lebih luas bagi para aktor di tingkat lokal, seperti pihak sekolah, tenaga pendidik, serta orang tua, baik dalam tahap perencanaan maupun evaluasi program. Keterlibatan mereka menjadi krusial bukan hanya untuk memastikan kebijakan selaras dengan realitas di lapangan, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap program di kalangan pelaksana.

Keempat, pemerintah perlu mengembangkan sistem umpan balik (feedback mechanism) yang lebih terstruktur dan tanggap, agar berbagai kendala yang muncul di tingkat sekolah dapat segera direspons dalam proses penyempurnaan kebijakan. Sistem ini dapat diwujudkan melalui penyediaan kanal pelaporan yang terintegrasi serta pelaksanaan evaluasi rutin yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kelima, dalam perspektif jangka panjang diperlukan pergeseran pendekatan dalam pelaksanaan program, dari yang sebelumnya berorientasi pada pemberian (charity-based approach) menuju pendekatan yang berlandaskan hak (rights-based approach). Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai penerima pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh layanan yang bermutu sekaligus berpartisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan.

Melalui berbagai langkah tersebut, implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyumas diharapkan tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan yang lebih substansial, yaitu peningkatan kesejahteraan serta kualitas gizi peserta didik secara berkelanjutan.